

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Intisari.....	vi
Abstract.....	vii
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
Bab II Tinjauan Pustaka.....	14
2.1. Keuangan Daerah.....	14
2.2. Kebijakan Publik.....	16
2.3. APBD Dalam Kekuasaan Politik.....	19
2.4. Politik Anggaran.....	21
2.5. Konflik Anggaran.....	26
2.6. Arogansi Birokrasi.....	29
2.7. Proses Perumusan Anggaran Daerah.....	34
2.8. Kerangka Berpikir Penetapan Anggaran Daerah (APBD).....	37

BAB III Metode Penelitian.....	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Fokus Penelitian.....	42
3.3. Jenis Data dan Sumber Data.....	43
3.4. Tehnik Pengumpulan Data.....	44
3.5. Analisa Dan Intepretasi Data.....	50
3.6. Keabsahan Data Atau Uji Pembuktian Data.....	53
BAB IV Deskripsi Wilayah Penelitian.....	55
4.1. Kondisi Geografis.....	55
4.1.1. Batas Administrasi dan Luas Wilayah.....	55
4.1.2. Keadaan Topografi.....	56
4.2. Kondisi Sosial Masyarakat.....	57
4.2.1. Jumlah Penduduk.....	57
4.2.2. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan.....	58
4.2.3. Penduduk Miskin.....	59
4.3. Kondisi Sarana Kesehatan.....	60
4.4. Kondisi Ekonomi.....	61
4.4.1. Sektor Unggulan.....	61
4.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	63
4.4.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	66
4.4.4. Struktur Ekonomi.....	67
4.4.5. Laju Inflasi.....	69
4.5. Pemerintahan.....	70
4.5.1. Pembagian Wilayah Administrasi.....	70
4.5.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	71
4.6. Kondisi Politik.....	72
4.6.1. Kekuatan Partai Politik Di DPRD.....	72

4.6.2. Kinerja DPRD.....	75
BAB V Proses Penyusunan APBD di Eksekutif.....	78
5.1. Penyusunan KUA-PPAS.....	83
5.1.1. Penyusunan Pra-RKA.....	84
5.1.2. Pagu Anggaran.....	85
5.1.3. RKPD Sebagai Dasar Penyusunan KUA-PPAS.....	89
5.1.4. KUA-PPAS Tidak Sesuai Dengan RKPD.....	92
5.1.5. Perumusan Kegiatan Yang Cenderung Monoton.....	99
5.1.6. Kegiatan Luncuran.....	100
5.1.7. Pembahasan KUA-PPAS Oleh TAPD.....	101
5.2. Penyusunan RKA.....	101
5.2.1. RKA Tidak Sesuai Dengan KUA-PPA.....	102
5.2.2. Penelitian RKA.....	105
5.2.3. Pembahasan RKA Dalam Forum TAPD Inti.....	107
5.2.4. Pengambilan Keputusan RAPBD Oleh Kepala Daerah.....	108
5.3. Penyusunan Raperda APBD.....	110
5.3.1. Penyiapan Raperda APBD Oleh DPPKAD.....	110
5.3.2. Penyusunan <i>Legal Drafting</i> Oleh Bagian Hukum.....	110
5.4. Hubungan Antar Bab.....	113
BAB VI Proses Pembahasan APBD di Legislatif.....	114
6.1. Pembahasan KUA-PPAS.....	115
6.1.1. Rapat Internal Badan Anggaran.....	117
6.1.2. Pembahasan KUA-PPAS Sebagai Alat Aspirasi Anggota DPRD.....	118
6.1.3. Pembahasan KUA-PPAS.....	119
6.2. Pembahasan RAPBD Oleh DPRD.....	121

6.2.1. Rapat Koordinasi Internal DPRD.....	123
6.2.2. Pembahasan Anggaran Oleh Panitia Khusus.....	125
6.2.3. Pembahasan Anggaran oleh Badan Anggaran.....	130
6.2.4. Persetujuan Bersama Pimpinan DPRD Dan Bupati.....	131
6.3. Pembahasan Hasil Evaluasi RAPBD Oleh Gubernur.....	131
6.4. Hubungan Antar Bab.....	133
BAB VII Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Magelang...	134
7.1. Benacana Alam Meletusnya Gunung Merapi Tahun 2010.....	141
7.2. Penyesuaian Regulasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial.....	146
7.3. Pemilihan Kepala Daerah.....	153
7.3.1. Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	153
7.3.2. Dualisme Kepemimpinan DPRD.....	155
7.4. Kemampuan Keuangan Daerah.....	158
7.5. Inkonsistensi Penyusunan Anggaran.....	161
7.6. Hubungan Eksekutif Dan Legislatif.....	164
7.7. Politisasi Anggaran.....	168
7.8. Komitmen Kerja.....	176
7.9. Hubungan Antar Bab.....	180
BAB VIII Kesimpulan dan Rekomendasi.....	182
8.1. Kesimpulan.....	182
8.1.1. Proses Penyusunan APBD Di Eksekutif.....	182
8.1.2. Proses Pembahasan APBD Di Legislatif.....	182
8.1.3. Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD.....	183
8.2. Rekomendasi Untuk Pemerintahan Kabupaten Magelang.....	184
8.3. Rekomendasi Untuk Pemerintah Pusat.....	185
8.4. Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya.....	186

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Penetapan APBD Dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan DPRD.....	39
Gambar 2.2	Proses Penetapan APBD Tanpa Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan DPRD.....	39
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Magelang.....	56
Gambar 4.3	Angka Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2012.....	59
Gambar 5.1	Dokumen Pokok Penganggaran Daerah.....	79
Gambar 5.2	Temuan Kegiatan Yang Tidak Ada di RKPD Masuk di KUA-PPA.....	93
Gambar 5.3	Temuan Kegiatan Yang Tidak Ada di KUA-PPA Masuk di RAPBD.....	103
Gambar 6.1	Proses Politik Pembahasan KUA-PPAS di DPRD.....	115
Gambar 6.2	Proses Politik Pembahasan RAPBD di DPRD.....	121

Gambar 2.1 Proses Penetapan APBD Dengan Persetujuan Bersama DPRD..	30
Gambar 2.1 Proses Penetapan APBD Tanpa Persetujuan Bersama DPRD.....	30
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Magelang.....	43
Gambar 4.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang.....	44
Gambar 4.3 Angka Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2012.....	47
Gambar 5.1 Dokumen Pokok Anggaran Daerah.....	64
Gambar 5.2 Ilustrasi Kegiatan Yang Tidak Ada di RKPD Masuk di KUA-PPA.....	78
Gambar 5.3 Ilustrasi Kegiatan Yang Tidak Ada di KUA-PPA Masuk di RAPBD.....	87
Gambar 6.1 Alur Pembahasan KUA-PPAS di DPRD.....	97
Gambar 6.2 Alur Pembahasan RAPBD di DPRD.....	103

.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Penetapan APBD Dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan DPRD.....	39
Gambar 2.2	Proses Penetapan APBD Tanpa Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan DPRD.....	39
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Magelang.....	56
Gambar 4.3	Angka Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2012.....	59
Gambar 5.1	Dokumen Pokok Penganggaran Daerah.....	79
Gambar 5.2	Temuan Kegiatan Yang Tidak Ada di RKPD Masuk di KUA-PPA.....	93
Gambar 5.3	Temuan Kegiatan Yang Tidak Ada di KUA-PPA Masuk di RAPBD.....	103
Gambar 6.1	Proses Politik Pembahasan KUA-PPAS di DPRD.....	115
Gambar 6.2	Proses Politik Pembahasan RAPBD di DPRD.....	121

Gambar 2.1 Proses Penetapan APBD Dengan Persetujuan Bersama DPRD..	30
Gambar 2.1 Proses Penetapan APBD Tanpa Persetujuan Bersama DPRD.....	30
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Magelang.....	43
Gambar 4.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang.....	44
Gambar 4.3 Angka Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2012.....	47
Gambar 5.1 Dokumen Pokok Anggaran Daerah.....	64
Gambar 5.2 Ilustrasi Kegiatan Yang Tidak Ada di RKPD Masuk di KUA-PPA.....	78
Gambar 5.3 Ilustrasi Kegiatan Yang Tidak Ada di KUA-PPA Masuk di RAPBD.....	87
Gambar 6.1 Alur Pembahasan KUA-PPAS di DPRD.....	97
Gambar 6.2 Alur Pembahasan RAPBD di DPRD.....	103
.....	